

# BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DIY

## Peran dan Fungsinya di Era Informasi

*Kristiana Swasti*

### **Kebutuhan Informasi**

Globalisasi menuntut setiap orang yang memiliki semangat kompetitif untuk berpikir dan bertindak secara efektif dan efisien. Era ini juga menuntut kecepatan dan ketepatan informasi. Penguasaan informasi menggantikan peran senjata dalam perang konvensional. Penguasaan informasi akan menentukan hegemoni suatu bangsa.

Dalam rangka berkompetisi di era yang tidak tersekat lagi oleh batas-batas budaya, politik, sosial, dan teritorial in tidak ada bangsa yang dapat menutup akses dengan dunia luar. Keleluasaan akses terhadap informasi dan kemampuan untuk memberdayakan informasi akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kualitas suatu bangsa. Demikian juga ketersediaan sumber informasi yang *acesible* menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Bahkan dalam piagam hak azasi manusia disebutkan bahwa memperoleh informasi dan memanfaatkannya dalam rangka mengembangkan kehidupan pribadi dan lingkungan sosial merupakan salah satu hak azasi yang harus dihormati.

Begitu juga dalam rangka mengembangkan kemajuan masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang transparan dibutuhkan ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan lengkap. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin transparansi serta kebebasan memperoleh informasi harus dilandasi azas manfaat dan diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan roda pemerintahan, pengawasan publik terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan, serta proses berbangsa dan bermasyarakat secara keseluruhan.

Kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu menjadi konsekuensi dari tugas dan fungsi dari lembaga publik untuk menciptakan iklim yang bersifat transparan serta menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Berbagai bentuk hambatan yang menghalangi akses informasi dari lembaga publik bisa berujung sanksi pidana.

## **Predikat Yogyakarta dan Konsekuensi**

Dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, peran lembaga penyedia informasi menjadi sesuai yang penting, strategis, dan mendasar. Hal ini selain Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan menentukan dalam perjalanan berbangsa dan bernegara juga menyangkut identitas Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan Pendidikan. Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang dan peran yang menentukan, Yogyakarta memiliki kekayaan intelektual yang tidak terhargai nilainya. Manuskrip, kitab-kitab, arsip, serta naskah-naskah kuno merupakan catatan penting yang menjadikan Yogyakarta diakui keberadaannya. Kekayaan intelektual tersebut, baik yang ada di Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, lembaga pemerintah, dan tokoh-tokoh yang memiliki keterikatan dengan Yogyakarta menjadi informasi yang akan memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi tegaknya predikat Yogyakarta sebagai ibukota kebudayaan dan peradaban adiluhung. Dari sini jatidiri bangsa dapat terumuskan dan terkonsep.

Tidak kalah pentingnya, predikat Kota Pendidikan. Akan sangat naif apabila predikat tersebut hanya diterjemahkan dari jumlah lembaga pendidikan dan pelajar di kota ini. Wahana menciptakan agen perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara mestinya menjadi acuan utama. Sudah tentu bagi masyarakat yang menempa diri melalui lembaga pendidikan dan budaya, kebutuhan informasi menjadi sesuai yang senantiasa harus terpenuhi.

Demikian halnya dalam mendukung terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yogyakarta selama ini dikenal dengan kepeloporannya dalam segala bidang dan segala jaman. Transparansi yang bertumpu pada ketersediaan informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kesinambungan peran Yogyakarta dalam kancah kehidupan moderen.

Oleh sebab itu, mestinya acuan dalam pengembangan masyarakat di Kota Yogyakarta tidak semata-mata diukur dari perkembangan fisik. Kemajuan fisik senantiasa akan mencapai pada kondisi *out of date* tetapi apabila parameter kemajuan Yogyakarta lebih ditekankan pada aspek intelektual akan memiliki umur panjang yang mampu melampau dimensi waktu. Dengan kata lain mestinya pola pembangunan di Provinsi DIY tidak semestinya 'hanya' seperti daerah lain, Jakarta sekalipun. Sektor-sektor yang memperteguh predikat yang melekat bagi Kota Yogyakarta mestinya menjadi pilar bagi pola pembangunan daerah. Sektor

kebudayaan, pendidikan, informasi, dan pariwisata seharusnya lebih diprioritaskan. Demikian juga lembaga perpustakaan dan arsip.

### **Lembaga Kearsipan sebagai Pilar**

Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa arsip merupakan informasi terekam tentang kegiatan atau suatu peristiwa, memiliki fungsi penting dari aspek yuridis, historis, sosiologis, maupun akademis.

Barangkali orang akan mengatakan berlebihan apabila diwacanakan bidang kearsipan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah di DIY. Akan tetapi mengingat fungsi arsip dalam tata kehidupan umat manusia serta kondisi riil DIY hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah. Setidak-tidaknya ada dua alasan untuk menempatkan bidang kearsipan sebagai salah satu pilar dalam pola pembangunan di Provinsi DIY. *Pertama*, berkaitan dengan peran sejarah Yogyakarta yang membentang sejak jaman Mataram Islam sampai saat ini. Kurun waktu yang demikian panjang telah melahirkan berbagai catatan sejarah dalam bentuk arsip yang memiliki nilai historis luar biasa. Demikian halnya berkaitan dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran penting Yogyakarta telah melambungkan Yogyakarta sebagai salah satu kota terpenting dalam sejarah Indonesia. Selain memiliki nilai historis, arsip-arsip yang terkait dengan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta merupakan kekayaan budaya yang memberikan kontribusi bagi pembentukan jati diri bangsa.

Adapun alasan *kedua* berkaitan dengan dinamika masyarakat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang sarat dengan nuansa intelektual. Bagi masyarakat yang berbasis pada budaya intelektual, informasi merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Sudah tentu salah satu sumber informasi yang memiliki kategori primer adalah arsip.

Arsip-arsip Yogyakarta, baik yang ada di Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, BPAD, ataupun lembaga kearsipan yang ada di Provinsi DIY juga merupakan kekayaan budaya. Dalam artian luas, arsip-arsip tersebut merupakan rekaman hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan dalam artian yang lebih sempit, banyak arsip yang informasinya memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan alasan tersebut semestinya lembaga kearsipan di DIY, baik BPAD maupun Kantor Arsip, maupun Kantor Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten/

Kota, harus memahami kondisi sosio kultural masyarakat Yogyakarta sehingga selain membangun citra juga mengembangkan lembaga kearsipan sebagai sumber referensi utama. Demikian halnya para pengambil kebijakan terkait, baik di ranah legislatif maupun eksekutif, harus memiliki terobosan yang ‘istimewa’ terkait dengan fungsi lembaga kearsipan di provinsi yang memiliki keistimewaan ini. Hal yang harus disadari adalah bahwa baik bagi daerah lain belum tentu baik untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.